


NASKAH PUBLIKASI

**SOLIDITAS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM
MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF 2014**

Oleh:
DYAH MELY ANAWATI
20150520149

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing


Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A
NIDN: 0510058503

Mengetahui,


**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Titus Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIDN: 0522086901

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIDN: 0528086601

SOLIDITAS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF 2014

Oleh:

Dyah Mely Anawati
Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A
dyah.mely@gmail.com
ridhoalhamdi@umy.ac.id

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

A number of politic analysis and survey institution predicted that PKS would not be succeeded entering the parliamentary threshold as 3,5 percent at the 2014 General Election since the President of PKS, Luthfi Hasan Ishaq, in January 2013 was stated by KPK as a suspect to cows meat corruption which put him in jail for 16 years. However, the statement was failed by the succeed of PKS in 2014 Legislation Election reaching 6,79 percent which only decreased 1,09 percent from the 2009 Legislation Election which reached 7,88 percent. This research aims to find out the solidity of PKS in facing the Legislation Election in 2014.

This research uses a qualitative research method completed with library study. The primary resources of this research are famous and credible online news website such as kompas.com and republika.co.id and the other media and the official website of Partai Keadilan Sejahtera. The secondary data of this research are the website of the center KPU, general election institution website, journals and other related sciences books. The data found then are reduced, provided systematically and rationally in order to provide answer and conclusion to the research. The result of this research shows that PKS can maintain its party solidity which is proven with four factors they are the existence of procedural leadership, a well-managed conflict resolution mechanism, systematic candidateship, and a strong commitment upon the values/ideology adopted together. The result of this research recommend PKS to be wiser in accomplishing internal conflict and to emphasize its commitment toward the party's ideology.

***Key words:* Solidity, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Islamic Party, Legislation Election 2014**

SINOPSIS

Sejumlah analis politik dan lembaga survei mengatakan bahwa PKS diprediksi tidak akan lolos *parliamentary threshold* (ambang batas parlemen) yang sebesar 3,5 persen pada Pemilu Legislatif 2014 karena Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq di Januari 2013 dinyatakan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus suap daging sapi yang membuat ia divonis 16 tahun penjara. Akan tetapi, PKS membuktikan bahwa ia mampu bangkit dengan hasil perolehan suara di Pileg 2014 mencapai 6,79 persen, hanya turun 1,09 persen dari Pileg 2009 yang mencapai 7,88 persen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui soliditas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Adapun data primer dari penelitian ini bersumber dari berita online dari media bereputasi dan kredibel seperti kompas.com dan republika.co.id serta beberapa media lainnya dan website Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini yaitu data dari website KPU Pusat, lembaga survei pemilu, jurnal dan buku-buku ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini. Data yang telah ditemukan kemudian direduksi, disajikan secara sistematis dan rasional untuk dapat memberikan jawaban dan kesimpulan terhadap penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKS mampu memelihara soliditas partai yang dibuktikan dengan empat indikator yakni memiliki sistem kepemimpinan prosedural, mekanisme resolusi konflik yang baik, kaderisasi yang sistematis, dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai bersama/ideologi. Hasil penelitian ini merekomendasikan PKS untuk lebih bijak dalam menyelesaikan konflik internal maupun eksternal dan mempertegas komitmennya terhadap ideologi partai.

***Kata Kunci:* Soliditas, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Islam, Pemilu Legislatif 2014**

Pendahuluan

Pemilihan umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah salah satu instrumen terpenting dalam sistem politik-demokratik modern. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu bahkan dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokratis atau tidaknya suatu negara. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilu tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya (Budiardjo, 2008: 461). Sistem pemilihan umum di Indonesia perlahan telah berkembang ke arah yang lebih demokratis sejak reformasi tahun 1998. Pemilu 2004 merupakan sebuah lompatan sejarah di Indonesia karena menjadi pemilu pertama yang menggunakan sistem proporsional terbuka, membuktikan bahwa rakyat telah lebih banyak dilibatkan dalam proses politik. Saat itu sistem kepartaian menganut sistem multi-partai (tanpa dominasi satu partai), dimana pemilu diikuti oleh 24 partai dan hanya 7 partai yang lolos ke DPR yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, Partai Demokrat, PKS, dan PAN (Budiardjo, 2008: 454).

Setiap partai politik tentu memiliki strategi yang berbeda-beda untuk

memperoleh suara tinggi pada pemilu. Momentum pemilu legislatif menjadi perhatian khusus bagi partai politik karena kemenangannya mampu mengantarkan calon legislator dari partainya lolos ke DPR. Bentuk konsolidasi partai politik dalam hal ini setidaknya memiliki dua dimensi yakni internal dan eksternal (Noor, 2012). Dimensi internal meliputi konsolidasi struktur dan konsolidasi agenda politik (ideologis), sedangkan dimensi eksternal meliputi konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal. Penelitian ini memilih Partai Keadilan Sejahtera (yang selanjutnya disingkat PKS) karena menganggap bahwa PKS memiliki soliditas yang kuat dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2014.

PKS sebagai konsekuensi partai kader memiliki karakteristik yang solid yang didukung oleh pondasi ideologi yang kuat, *leadership* yang relatif baik secara internal dan kader-kader yang militan dalam struktur, baik pusat maupun daerah. Walaupun demikian, perbedaan pandangan yang terjadi pasca Pemilu 2004 menyebabkan PKS terpecah menjadi dua faksi, yaitu faksi keadilan dan faksi sejahtera. Hal ini terkait dengan munculnya perdebatan tentang siapa kandidat presiden pada putaran pertama pilpres yang akan didukung PKS. Faksi keadilan merupakan orang-orang tua di

dalam PKS dan kelompok yang cenderung konservatif, sedangkan faksi sejahtera adalah kelompok muda alias pembaharu. Bagi faksi keadilan, faksi sejahtera adalah kelompok liberal dalam partai.

Dalam kasus PKS, isu moral politik yang menimpa kader adalah hal paling krusial yang harus dihadapi menjelang Pemilu 2014. Isu negatif yang paling disorot hingga sekarang yaitu kasus suap impor daging sapi yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq selaku Presiden PKS di awal tahun 2013. Luthfi terbukti menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT. Indoguna Utama terkait penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Luthfi divonis 18 tahun penjara dan hak politiknya dicabut. Dengan peristiwa tersebut, PKS yang memosisikan diri sebagai partai beragama dengan *tagline* bersih dan peduli menunjukkan bahwa slogan-slogannya selama ini hanya omong kosong.

Sejak kasus itu ramai dibicarakan, sejumlah lembaga survei meyakini bahwa perolehan suara PKS di Pemilu 2014 akan turun drastis. Dari yang semula presentase suara PKS sebesar 7,88 persen di Pemilu 2009, diperkirakan akan merosot dan bahkan tidak lolos ambang batas parlemen yang saat itu sebesar 3,5 persen. Dimulai dari hasil

survei Litbang Kompas pada Juli 2012 di 33 provinsi yang menunjukkan suara PKS turun drastis ke angka 2,5 persen. Survei Kompas ini mengambil sampel sebanyak 1.008 dengan sampling error kurang lebih 3,1 persen. Terdapat pula hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Januari 2014, terdapat empat partai politik yang elektabilitasnya rendah dan terancam tidak lolos ambang batas parlemen yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 2,2 persen, Partai Nasdem 2 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) 0,7 persen dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 0,5 persen (Kompas.com, 2 Februari 2014). Namun menurut Adjie Alfaraby selaku peneliti LSI sebagaimana dilansir oleh Kompas.com (2014) menyampaikan bahwa PKS akan mampu menembus ambang batas parlemen jika bekerja keras karena partai ini dinilai memiliki solidaritas organisasi dan militansi kader yang cukup kuat.

PKS tentu patut berbangga hati karena rekapitulasi resmi KPU pada Pemilu 2014 menunjukkan bahwa perolehan suara PKS masih berada di angka aman yaitu 6,79 persen. PKS mengalami penurunan sebesar 1,09 persen dari Pemilu 2009 yang saat itu sebesar 7,88 persen. Penurunan perolehan suara PKS sebesar 1,09 persen membuat banyak hasil survei meleset karena selisih

angka yang cukup jauh. Menurut hasil survei, perolehan suara PKS di Pemilu 2014 rata-rata hanya 2 – 3 persen, sementara partai ini ternyata masih mampu mencapai suara sebesar 6,79 persen. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar mengingat saat itu PKS sangat terpuruk dengan ditetapkannya Luthfi Hasan Ishaq selaku Presiden PKS menjadi tersangka karena kasus korupsi. Muhammad Anis Matta yang terpilih menjadi Presiden PKS menggantikan Luthfi Hasan diharapkan membawa angin segar dan harapan baru bagi PKS untuk mampu bangkit menghadapi Pemilu 2014.

Anis Matta memang bukan orang baru di PKS, sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS selama 3 periode sejak tahun 2003. Anis banyak dikenal dan disenangi di PKS, setelah menjabat sebagai Presiden PKS pun ia kerap menemui para kader di daerah untuk memberikan semangat dan meyakinkan bahwa PKS optimis dapat mendulang banyak suara dan mempertahankan eksistensinya di Pemilu 2014. Meskipun topik ini bergulir pada tahun 2014, perlu diketahui bahwa belum ada kajian yang komprehensif mengenai soliditas PKS untuk dapat *survive* pada Pemilihan Legislatif 2014 setelah dihantam isu-isu negatif. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengkaji upaya PKS dalam

memelihara soliditas partai terutama dalam menghadapi Pemilihan Legislatif 2014, sehingga penelitian ini berjudul Soliditas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Menurut Nazir (2003: 27), studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku – buku, literatur – literatur, catatan – catatan, dan laporan – laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus penelitian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera dalam konteks soliditas pada Pemilu Legislatif 2014.

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan menghimpun data dan informasi dari berbagai sumber terpercaya, terutama dari media elektronik yang relevan dengan topik penelitian. Secara spesifik, penelitian ini akan fokus dan berkonsentrasi pada berita yang terkait dengan PKS dari media bereputasi dan kredibel seperti kompas.com dan republika.co.id sebagai media utama dan

sedikit tambahan dari media lain dengan rentang waktu antara Januari 2013 saat kasus Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq mulai ramai diperbincangkan hingga April 2014 saat Pemilihan Legislatif 2014.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara singkat dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Moleong, 2010: 208).

- a. Reduksi data: Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data: penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.
- c. Kesimpulan: Ini adalah tahapan akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan *big data*, yakni data yang terekam secara digital dengan jumlah yang berlimpah dan mudah didapatkan. *Big data* telah mendobrak tradisi lama penelitian ilmu sosial, karena memberikan solusi bagi penelitian sosial, khususnya untuk menangkap realita seperti pola jaringan komunikasi, diseminasi informasi, atau bahkan memprediksi pola gerakan sosial atau politik berdasarkan perilaku secara online (Rumata, 2016: 156). Penggunaan *big data* mengacu pada proses mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisa sekumpulan *big data* untuk mendapatkan pola-pola informasi yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Terdapat empat indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepemimpinan prosedural, mekanisme resolusi konflik, kaderisasi sistematis, dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama/ideologi. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Kepimpinan Prosedural

Terdapat dua parameter dalam indikator ini, yakni struktur kepengurusan dan tokoh karismatik. Indikator ini akan lebih spesifik menjelaskan mengenai proses

pengambilan keputusan dalam struktur kepengurusan. Selain itu, bagian ini juga akan membahas mengenai sosok tokoh karismatik dalam PKS yang memiliki andil dalam soliditas partai.

Penetapan Luthfi Hasan Ishaq (LHI) menjadi tersangka pada 31 Januari 2013, membuatnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PKS. Majelis Syura PKS kemudian melangsungkan rapat pergantian struktur internal di posisi presiden PKS. Proses pergantian tersebut berjalan cukup alot. Muncul nama-nama calon seperti Al Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Anis Matta, dan Hidayat Nur Wahid. Nama-nama tersebut diajukan oleh anggota Majelis Syura, di mana semua anggota memang berhak memberikan nama. Kemudian, dari keempat nama itu mengerucut menjadi dua nama, yakni Anis Matta dan Hidayat Nur Wahid. Anis Matta yang merupakan sekjen PKS selama tiga periode, memiliki rekam jejak yang cukup baik. Hanya saja Anis sempat dikhawatirkan tersandung kasus hukum. Pasalnya, ia pernah diperiksa dalam kasus dugaan suap PPID (Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) pada awal tahun 2012 dengan tersangka Wa Ode Nurhayati. Sedangkan Hidayat sudah pernah menjabat sebagai Presiden PKS pada periode 2000-2004 (Tribunnews.com, 2 Februari

2013). Forum tersebut akhirnya memutuskan memilih Anis Matta untuk menggantikan Luthfi, mengingat Anis terbukti tidak terlibat dalam kasus suap PPID. Setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, Anis Matta kemudian mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Ketua DPR RI dan keanggotaannya di DPR RI.

Ketua Majelis Syura memang memiliki peran yang dominan di PKS. Misalnya, ia berwenang mengajukan nama-nama Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Presiden, Sekjen, Bendahara Umum dan Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) untuk ditetapkan dalam musyawarah Majelis Syura. Di samping itu, Ketua Majelis Syura juga memimpin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), atau Majelis Riqabah 'Amnah (MRA), yang berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura (MPP PKS, 2008: 592).

Selain menunjuk Anis Matta sebagai Presiden PKS, rapat Dewan Tingkat Pimpinan Pusat PKS juga memutuskan pergantian struktur internal lainnya. Sekretaris jenderal yang sebelumnya diisi oleh Anis Matta diganti oleh Muhammad Taufik Ridho. Diketahui sebelumnya, Taufik Ridho menjabat sebagai Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan. Hilmi mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah digelar

rapat oleh Majelis Syura pada 31 Januari 2013, dan atas penetapan Sekjen DPP baru tersebut, maka akan dilaporkan ke Majelis Syura dalam musyawarah Majelis Syura mendatang (Kompas.com, 1 Februari 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas, kepemimpinan prosedural PKS dalam konteks jelang Pemilu 2014 lebih dikontrol secara penuh dan didominasi oleh Majelis Syura. Majelis Syura mempunyai peran sentral yang cukup kuat dalam penentuan pergantian internal partai yang dibuktikan dengan keterpilihan Anis Matta menjadi Presiden PKS menggantikan posisi Luthfi Hasan Ishaq dan Taufik Ridho menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS menggantikan Anis Matta. Pemilihan dua kader terbaik PKS ini dilakukan dengan begitu cepat pasca penetapan LHI menjadi tersangka agar tidak ada kekosongan kekuasaan dan situasi internal partai kembali stabil.

Parameter selanjutnya dalam indikator ini yaitu tokoh karismatik. Kemunculan Anis Matta di tengah badai politik yang menerpa PKS seperti membawa angin segar bagi internal partai. Anis Matta berada di puncak kapasitas adrenalin yang penuh, pasca salah satu orang terdekatnya, Luthfi Hasan Ishaq, terjerat kasus suap. Setelah ditetapkan sebagai presiden, ia

berbicara di hadapan publik bahwa apa yang dihadapi PKS adalah sebuah konspirasi besar yang bertujuan menghancurkan partainya, sehingga ia ingin kasus tersebut dijadikan sebagai pembenahan diri sekaligus momentum kebangkitan PKS. Saat diundang di program Gestur TVOne (14 Maret 2013), Anis meluruskan bahwa kata konspirasi bukan ditujukan untuk pihak lain, melainkan untuk sekadar menenangkan kader-kader PKS yang kecewa dan marah atas apa yang telah terjadi.

Menurut Anis, kader saat itu telah kehilangan tiga hal, yaitu harapan, kebanggaan kepada partainya sendiri, dan yang terpenting adalah kepercayaan diri. Tiga hal tersebut merupakan sebuah sumber energi yang membuat seseorang bisa bergerak dan bekerja, sehingga jika hal tersebut hilang maka orang akan lumpuh. Anis yang saat itu dipercaya dapat menyelamatkan partai kemudian menemukan satu kata yang dapat menghadirkan tiga hal itu kembali seketika dan memicu adrenalin kader untuk kembali berjuang. Kata konspirasi menurut Anis adalah yang paling tepat, walaupun kemudian banyak pihak yang menyayangkan Anis mengeluarkan kata tersebut karena terkesan menuduh apa yang dilakukan KPK terhadap LHI adalah sebuah konspirasi (Gestur TVOne, 14 Maret 2013).

Kepemimpinan Anis Matta dinilai berhasil dengan perolehan suara PKS pada Pileg 2014 yang hanya turun 1,09 persen dari Pileg 2009, yang mana itu sangat jauh dari perkiraan lembaga-lembaga survei. Dengan wawasan yang luas dan pengalamannya berkecimpung di PKS, ia mampu mempertahankan kursi PKS meski dilanda isu negatif yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq. Keputusan Anis Matta mengambil posisi kepemimpinan di kala partai sedang dihantam kasus korupsi, kemudian mampu menyelamatkan partai dengan membersihkan isu-isu negatif yang melekat pada partai membuat Anis pantas disebut tokoh karismatik PKS, karena dengan imbauan-imbauan dan pembawaannya yang optimis ia mampu memengaruhi kader dan simpatisan untuk tidak berhenti berjuang.

Mekanisme Resolusi Konflik

Pada bagian ini, akan dijelaskan bagaimana sebuah partai politik dapat mengelola dan menghentikan konflik dengan lembaga-lembaga yang sengaja dibentuk untuk menangani masalah-masalah internal partai. Terdapat dua tingkat resolusi konflik yaitu pencegahan konflik dan penghentian konflik, yang dengan sedemikian rupa akan direfleksikan pada internal PKS. Partai ini dikenal sebagai partai kader yang memiliki karakteristik yang solid, meskipun dewasa ini

sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat faksionalisasi dalam PKS. Keberadaan faksi di PKS berawal dari Pemilu Presiden 2004 yang memunculkan spekulasi perpecahan internal partai, di mana saat itu muncul tafsiran mengenai “faksi keadilan” yang mendukung Amien Rais dan “faksi kesejahteraan” yang menjagokan Wiranto. Musyawarah Majelis Syura pun akhirnya secara formal mendukung Amien Rais.

Dalam konteks jelang Pemilu 2014, tidak ada konflik yang cukup menguat muncul ke permukaan seperti yang dialami PPP dan Golkar yang mana sempat ada isu penggulingan ketua umum. Namun demikian, penelitian ini mencoba untuk menguraikan konflik internal PKS di antara dua faksi yang tumbuh di dalam partai ini yakni faksi kesejahteraan dan faksi keadilan menjelang Pemilu 2014. Konflik ini muncul karena kedua faksi memiliki perbedaan pandangan dalam menghadapi permasalahan, yakni terkait respons terhadap kasus LHI dan isu kenaikan BBM pada pertengahan tahun 2013.

Pasca LHI ditetapkan sebagai tersangka, PKS menerjunkan tim hukum yang akan membantu kelancaran sidang Luthfi. Tim hukum ini salah satunya beranggotakan Fahri Hamzah yang berada di faksi kesejahteraan. Tim hukum PKS ini

memang tidak mendampingi proses hukum Luthfi secara langsung, tetapi mereka dibentuk untuk bekerjasama dengan tim penasehat hukum Luthfi dengan harapan proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan lancar. Berbeda dengan Fahri, Tifatul Sembiring yang saat itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di era SBY, menilai bahwa semua pihak mesti menghormati keputusan pengadilan. Posisi Tifatul sebagai menteri mungkin menjadi salah satu alasan untuk dia terkesan pasrah dan manut dengan putusan pengadilan terhadap kasus Luthfi.

Selain itu, kedua faksi ini juga memicu konflik internal PKS saat pemerintah di 2013 lalu berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Konflik ini pun lagi lagi ditengarai oleh Fahri Hamzah dan Tifatul Sembiring yang memiliki pandangan berseberangan. Fahri yang saat itu menjabat Wasekjen PKS bersuara keras menolak kenaikan BBM. Sikap elite PKS itu kemudian dikritik berbagai pihak, termasuk anggota koalisi. Menurut mereka, PKS sebagai anggota Sekretariat Gabungan seharusnya mendukung kebijakan pemerintah. Di samping itu, Tifatul ingin menyarankan partainya untuk mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM, meskipun ia tau bahwa keputusan tetap

berada di Majelis Syura. Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhri, sebagaimana dilansir oleh Republika.co.id (19 Juni 2013), sebagai Menkominfo sikap Tifatul sudah benar mendukung pemerintah sebab ia adalah pembantu Presiden SBY, sehingga walaupun ia ingin pindah partai karena sebab PKS tidak sepakat menaikkan harga BBM itu tidak menjadi masalah.

Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan pandangan kedua faksi tidak menimbulkan konflik yang serius di dalam internal partai. Meskipun PKS sempat diberitakan terpecah karena isu kenaikan BBM, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak memengaruhi soliditas partai menjelang Pemilu 2014. Tifatul Sembiring yang menginginkan PKS mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM, pada akhirnya Tifatul juga harus manut dengan putusan Majelis Syura yang menolak kenaikan harga BBM.

Parameter selanjutnya yaitu penghentian konflik. Di dalam PKS, perangkat/lembaga untuk mendeteksi adanya konflik yaitu *halaqah*, Dewan Syariah, Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO), dan Majelis Syura, yang berdampingan langsung dengan persoalan kehidupan keseharian partai dan kader (Noor, 2015:

274). Meskipun PKS memiliki mekanisme resolusi yang baik, namun pada kenyataannya terdapat konflik di internal PKS yang terjadi berkepanjangan dan hanya menjadi tontonan publik tanpa penyelesaian yang jelas.

Dalam konteks penelitian ini, penghentian konflik akan difokuskan di akhir konflik yang cukup menguat pada saat itu yakni konflik antara Yusuf Supendi dan elite PKS, di mana Yusuf masih menyimpan dendam karena pada tahun 2010 ia dipecat dari PKS secara tidak hormat. Yusuf yang kemudian sering melontarkan kritikan kepada PKS, terkesan sangat puas ketika salah satu elite PKS yang dibencinya yakni Luthfi Hasan Ishaq ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK karena kasus suap dan meyakini bahwa di Pemilu 2014 PKS akan hancur.

Serangan bertubi-tubi yang dilakukannya ke PKS nyatanya tidak dihiraukan oleh elite PKS. Partai tersebut meskipun belum mampu menghentikan konflik dengan Yusuf, namun mencoba meyakinkan publik bahwa dengan dipecatnya Yusuf maka konflik antar keduanya berakhir. Meskipun di sisi lain Yusuf masih merasa didzolimi dan menganggap konflik dengan PKS belum

menemukan kata islah (damai) hingga pada detik terakhir kematiannya.

Kaderisasi Sistematis

PKS dalam AD/ART telah menjelaskan di Pasal 9 bahwa partai menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi anggota. Rekrutmen berfungsi untuk mengisi posisi internal dan anggota parlemen, tetapi bagian ini akan fokus terhadap rekrutmen politik dalam arti anggota parlemen, sedangkan kaderisasi anggota berfungsi untuk melakukan pengembangan kader. DPP PKS melalui Departemen Kaderisasi menyediakan seperangkat kurikulum dan pedoman praktis pelaksanaan kaderisasi dan mengomunikasikannya ke seluruh departemen kaderisasi di Indonesia. Partai menyadari bahwa kekuatan utama partai bergantung pada pertumbuhan kader, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas.

Menjelang Pemilu 2014, Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa elektabilitas PKS mengalami penurunan dibanding Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, yakni di angka 6,1 persen (Beritasatu.com, 27 Februari 2014). Menurut Direktur LSIN, Yasin Mohammad sebagaimana dikutip oleh Beritasatu.com (27 Februari 2014), akar

kehancuran PKS adalah tidak adanya kesepahaman atau sevisi para kader PKS. Menurutnya, kehancuran PKS dimulai saat partai itu mulai memosisikan diri sebagai partai yang inklusif dengan menerima kader non-Muslim.

Legalisasi keanggotaan non-Muslim terjadi bukan tanpa alasan, karena berdasarkan pertimbangan semakin banyaknya pendukung PKS dari kalangan non-Muslim di Indonesia Timur, seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Pernyataan menarik disampaikan oleh Abdul Munir Mulkan sebagaimana yang dilansir oleh Kompas.com (18 Juni 2010), ia meyakini bahwa non-Muslim tidak akan dilibatkan dalam Majelis Syura PKS. Menurutnya, jika anggota Majelis Syura sudah ada yang berasal dari non-Muslim, maka menandakan bahwa ideologi PKS telah berubah karena Majelis Syura adalah pimpinan tertinggi partai dan di sana lah segala kebijakan partai ditentukan. Dengan demikian, ideologi PKS tetap terjaga meskipun PKS sudah mendeklarasikan sebagai partai terbuka dengan menerima anggota non-Muslim. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi PKS karena terbukti hingga sekarang anggota Majelis Syura tidak ada yang berstatus non-Muslim. Dalam konteks jelang Pileg 2014, Sekjen PKS Taufik Ridho sebagaimana yang dilansir

dalam Republika.co.id (22 April 2013) mengatakan bahwa partainya untuk DPR Pusat akan mengusung dua caleg non-Muslim dari dapil Papua dan Papua Barat. Akan tetapi, pada kenyataannya data KPU Pusat menunjukkan tidak ada satu pun caleg PKS di tingkat nasional berlatar belakang non-Muslim yang maju menjadi kandidat Pemilu Legislatif 2014. Meskipun sejumlah provinsi didominasi penduduk non-Muslim seperti Bali, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua, tetapi data di website resmi KPU (kpu.go.id) menunjukkan bahwa tidak ada satu pun caleg non-Muslim. Data ini menunjukkan bahwa sulit bagi non-Muslim untuk maju menjadi caleg PKS, sehingga sulit dikatakan PKS sebagai partai terbuka meskipun pada tahun 2008 partai ini telah mendeklarasikan sebagai partai terbuka.

Parameter yang kedua pada indikator ini yaitu rekrutmen politik. Dalam memutuskan kader mana yang akan mewakili partai di pemilihan umum, PKS membuat sejumlah tahapan evaluasi untuk menelaah secara mendalam kemampuan politik dan kepribadian kandidat, yang akhirnya akan menentukan kelayakan mereka. Partai juga menyelenggarakan pemilihan internal sebagai proses untuk memutuskan siapa saja yang dapat menjadi caleg. Melalui proses transparan yang melibatkan banyak kader,

partai dapat menghindari kecenderungan kolusi dan nepotisme. Hal ini karena elite partai bukanlah satu-satunya pihak yang terlibat dan menentukan proses rekrutmen, melainkan juga ribuan kader inti yang harus pula dipertimbangkan aspirasi dan pendapatnya (Noor, 2015: 345).

Dalam konteks penelitian ini, PKS dalam menjaring caleg eksternal akan memilih orang yang memiliki dukungan di luar massa PKS. Hal itu disampaikan oleh salah satu pimpinan DPP PKS Nasir Djamil yang sebagaimana dilansir oleh Sindonews.com (29 Januari 2013), yang juga mengatakan bahwa partainya lebih mendorong kader internal yang sudah teruji kemampuannya sehingga pada di Pileg 2014 PKS tidak mengusung caleg artis. Hal ini terkonfirmasi oleh Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid (dalam Kompas.com, 9 April 2013) yang mengatakan bahwa tidak ada satu pun artis yang masuk dalam daftar caleg PKS. Ia menambahkan bahwa partainya bukan lah anti-artis, melainkan lebih mengutamakan kaderisasi yang dirasa sudah cukup memenuhi kualifikasi. Namun PKS pada Pileg 2014 juga membuka ruang bagi caleg eksternal, yang mana terdapat tiga syarat untuk bisa menjadi mencalonkan diri. Pertama, tidak memiliki catatan hukum, lalu tidak mempunyai cacat moralitas, dan yang

terakhir memiliki keluarga yang relatif stabil (Detik.com, 25 Januari 2013).

Dalam konteks Pileg 2014, penelitian ini membuktikan bahwa PKS serius dalam menjaring caleg, baik yang internal maupun eksternal. Meskipun partai ini membuka jalan bagi non-kader termasuk artis untuk dapat mencalonkan diri sebagai caleg, namun tidak mudah untuk lolos karena PKS hanya akan mencari kandidat yang memang sejalan dengan visi dan misi partai, bukan hanya bermodalkan popularitas. Tidak seperti partai Islam lainnya seperti PAN, PKB, dan PPP yang masing-masing mengusung caleg artis. Hal ini yang membedakan PKS dengan partai lainnya. Selain itu, PKS telah berhasil memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dengan jumlah caleg perempuan mencapai 38,8 persen di seluruh daerah pemilihan.

Komitmen terhadap Nilai-Nilai atau Ideologi

Bagian ini akan menjelaskan dua hal, yakni platform partai dan komitmen kader. Platform partai akan berbicara mengenai sejauh mana PKS memperjuangkan nilai-nilai Islam, dan komitmen kader akan membahas tentang personal kader sendiri dalam menjalankan nilai-nilai tersebut, tentunya dalam konteks jelang Pileg 2014.

Pada Platform Kebijakan Pembangunan PKS, ditegaskan kembali karakteristik PKS sebagai partai dakwah, hanya saja bukan sekedar bekerja *struggle of power* secara struktural politik 5 tahunan dalam bingkai pemilu, melainkan juga sebagai partai yang menjalankan kerja-kerja kultural dalam pembangunan umat dan peradaban. Di dalam konteks inilah dapat dijabarkan tekad PKS sebagai sebuah institusi dakwah yang mengusung prinsip dan komitmen *bersih, peduli, dan professional*. Dalam sebuah diskusi platform kebijakan pembangunan PKS, politikus PKS Sohibul Iman sebagaimana dilansir oleh Sindonews.com (7 Januari 2014) menjabarkan platform visi, misi, dan prioritas PKS tahun 2014. Dengan ideologi berasas Islam, PKS sadar apa yang menjadi dasar dan bahan inspirasinya adalah Islam.

Selain itu, karena perbedaan ideologi yang sangat mencolok dan ekstrem, PKS belum pernah berada dalam satu koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini pertama dibuktikan dengan PKS yang tidak pernah satu koalisi dengan PDIP di tingkat nasional. Kedua, jika presiden diusung oleh PDIP (seperti Megawati dan Joko Widodo), PKS juga tidak berada dalam lingkaran pemerintah. Komitmen PKS terhadap

ideologi dan PDIP yang terlalu “kiri” membuat keduanya di tingkat nasional tidak pernah berada dalam satu koalisi.

Dalam konteks jelang Pemilu 2014, terdapat tiga hal yang menjadi fokus penelitian yakni adanya platform dan prioritas partai yang berasaskan Islam, tidak adanya caleg non-Muslim, dan sikap politik PKS yang tidak berkoalisi dengan PDIP karena ideologi yang begitu berseberangan. Pasca kasus LHI, kepercayaan masyarakat terhadap partai Islam khususnya PKS yang identik dengan partai bersih mulai hilang. Namun dengan beberapa keputusan dan sikap partai di atas memperkuat komitmen PKS terhadap ideologinya sehingga memupuk kembali kepercayaan masyarakat.

Parameter selanjutnya yakni komitmen kader, yang mana PKS dengan ideologi yang berlandaskan Islam membawa harapan bahwa kader-kadernya memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai bersama dan tidak menyimpang dari ideologi partai. Dalam upaya mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai bersama PKS mengembangkan infusi ideologi. *Halaqah* pada level kader biasa atau *usrah* pada level elite partai atau juga kerap secara formal disebut sebagai Taklim Rutin Mingguan (TRM) menjadi salah satu media terpenting dari infusi ideologi ini. Proses ini

tidak berhenti meskipun kader telah menempati posisi publik yang penting, seperti anggota parlemen atau kepala daerah.

Kegiatan-kegiatan dalam memelihara nilai-nilai bersama untuk menjaga komitmen kader di atas terbukti membawa PKS mewujudkan cita-cita partai untuk menjadi partai yang bersih. Citra partai bersih PKS kemudian tercoreng setelah ditetapkannya LHI Presiden PKS sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi pada 31 Januari 2013. Meskipun demikian, PKS tetap mendapat predikat partai terbersih di tahun 2014. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan tren korupsi yang disusun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), dua partai terbawah diduduki oleh PKS dengan 2 kasus dan PKPI 1 kasus (ICW, 29 Maret 2014). Hal ini membuktikan bahwa kader-kader PKS mampu berkomitmen dengan cita-cita partai yang bersih dari korupsi.

Selain itu, kekecewaan kader PKS terhadap kasus LHI tidak menciutkan semangat mereka untuk berjuang pada Pemilu 2014. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kader partai yang mengundurkan diri pasca kasus tersebut. Meskipun banyak yang memprediksi PKS akan hancur pada 2014, kader di pusat maupun daerah tetap bersatu demi mewujudkan target partai untuk memperoleh tiga besar di Pileg 2014. Sikap

kader tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya *halaqah* dan berbagai pelatihan lainnya yang juga menanamkan rasa loyalitas kepada setiap kader. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kader PKS memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan nilai-nilai bersama partai dan membuktikan bahwa PKS mampu memelihara soliditasnya meskipun badai menerjang internal partai.

Kesimpulan

PKS dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2014 di tengah prahara politik terbukti masih mampu memelihara soliditasnya, dibuktikan dengan hasil penelitian pada empat indikator yaitu kepemimpinan prosedural, mekanisme resolusi konflik, kaderisasi sistematis, dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama/ideologi. Meskipun faksionalisasi di tubuh PKS terlihat jelas di beberapa situasi karena perbedaan pandangan, namun hal tersebut belum pernah menimbulkan konflik yang mengancam soliditas partai. Kasus yang dialami Presiden PKS menjadi ujian terberat partai karena bertepatan dengan tahun politik yakni menjelang Pemilu 2014. PKS yang kemudian “diramal” akan hancur di 2014 terbukti dapat memelihara soliditasnya karena partai ini memiliki sistem kepemimpinan prosedural, mekanisme resolusi konflik yang baik, kaderisasi yang

sistematis, dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai bersama/ideologi.

Melalui empat indikator tersebut, soliditas PKS tergolong stabil sehingga partai ini pada Pileg 2014 masih lolos *parliamentary threshold* (ambang batas parlemen) dengan perolehan suara sebesar 6,79 persen, hanya turun 1,09 persen dari Pileg 2009 yang mencapai 7,88 persen. PKS sebagai konsekuensi partai kader terbukti memiliki karakteristik yang solid yang didukung oleh fondasi ideologi yang kuat, *leadership* yang relatif baik secara internal dan kader-kader yang penuh komitmen, baik pusat maupun daerah.

Daftar Pustaka

Budiardjo, M. (2008). *Dasar – dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Beritasatu.com. (1 Februari 2013). *Kader PKS Cemas Kasus Luthfi Pengaruhi Pemilu 2014*. Diambil dari <http://sp.beritasatu.com/home/kader-pks-cemas-kasus-luthfi-pengaruhi-pemilu-2014/30040>

Detik.com. (25 Januari 2013). *Ini 2 syarat untuk bisa jadi caleg PKS*. Diambil dari <https://news.detik.com/berita/215215>

[6/ini-3-syarat-untuk-bisa-jadi-caleg-pks](https://news.detik.com/berita/215215/6/ini-3-syarat-untuk-bisa-jadi-caleg-pks)

Gestur TVOne. (14 Maret 2013). *Saat PKS menepis badai*. Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=A8tzCQwjSPA&t=525s&index=3&list=LLi4D2mZm0x-9CK-XLhIZPCg>

Indonesia Corruption Watch (ICW). (29 Maret 2014). *Mengukur partai terkorup*. Diambil dari <https://antikorupsi.org/id/news/mengukur-partai-terkorup>

Kompas.com. (18 Juni 2010). *Keterbukaan ala PKS*. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2010/06/18/1140588/keterbukaan.ala.pks>

Kompas.com. (1 Februari 2013). *Taufik Ridho jabat Sekjen PKS*. Diambil dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2013/02/01/15111854/Taufik.Ridho.Jabat.Sekjen.PKS>

Kompas.com. (9 April 2013). *Tak ada artis dalam daftar caleg PKS*. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2013/04/09/14301054/tak.ada.artis.dalam.daftar.caleg.pks>

Moleong, L. J. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

MPP PKS. (2008). *Memperjuangkan masyarakat madani: Falsafah dasar*

- perjuangan dan platform kebijakan pembangunan PK Sejahtera*. PKS: Majelis Pertimbangan Pusat.
- Nazir, M. (2003). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor, F. (2012). *Institutionalising Islamic political parties in Indonesia: A study of internal fragmentation and cohesion in the Post-Soeharto Era (1998-2008)*. University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor Philosophy in Arab and Islamic Studies.
- Noor, F. (2015). *Perpecahan dan soliditas partai Islam: Kasus PKB dan PKS di dekade pertama reformasi*. Jakarta: LIPI Press.
- Republika.co.id. (19 Juni 2013). *Pengamat: Friksi faksi keadilan dan sejahtera menguat*. Diambil dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/19/momvwy-pengamat-friksi-faksi-keadilan-dan-sejahtera-menguat>
- Rumata, V. M. (2016). Peluang dan tantangan big data dalam penelitian ilmu sosial: Sebuah kajian literature. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 20(1), 155 – 167.
- Sindonews.com. (29 Januari 2013). *PKS utamakan kader ketimbang rekrut artis jadi caleg*. Diambil dari <https://nasional.sindonews.com/read/711976/12/pks-utamakan-kader-ketimbang-rekrut-artis-jadi-caleg-1359427597>
- Sindonews.com. (7 Januari 2014). *Platform PKS di 2014*. Diambil dari <https://nasional.sindonews.com/read/824289/12/platform-pks-di-2014-1389080246>
- Tribunnews.com. (2 Februari 2013). *Kisah mulusnya pergantian Presiden PKS dari Luthfi Hasan ke Anis Matta*. Diambil dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/02/02/kisah-mulusnya-pergantian-presiden-pks-dari-luthfi-hasan-ke-anis-matta?page=2>